

ABSTRAK

Peraturan mengenai upah minimum diperkenalkan untuk membatasi perolehan gaji yang diterima oleh buruh dalam sebulan. Regulasi upah minimum juga membatasi perusahaan agar tidak memberi gaji buruh dibawah batas minimum. Upah minimum di Indonesia disebut dengan UMK (Upah Minimum Kerja) dan UMSk (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota). Nilai UMK dilakukan berdasarkan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan melalui survei oleh Dewan Pengupahan Kabupaten. Namun nilai UMK yang ditetapkan tak pernah memenuhi kebutuhan hidup buruh secara riil di lapangan. Komponen yang dimasukkan dalam KHL kurang memadai tanpa kualitas yang layak.

Hal inilah yang membuat buruh menuntut kenaikan UMK secara rutin tiap tahun. Upaya buruh untuk menuntut kenaikan UMK mencapai hasilnya tahun 2012. Penelitian fokus pada gerakan buruh Sidoarjo yang dimotori oleh PC FSP KEP SPSI Sidoarjo dalam menuntut kenaikan UMK tahun 2013. Penelitian menggunakan studi deskriptif kualitatif guna mendapatkan pemahaman rinci tentang mobilisasi gerakan buruh Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Peneliti menggunakan teori mobilisasi Charles Tilly untuk memahami gerakan yang dilakukan oleh PC FSP KEP SPSI Sidoarjo dalam menuntut kenaikan UMK tahun 2013.

Gerakan buruh yang dilakukan oleh PC FSP KEP SPSI KEP Sidoarjo terjadi melalui pembentukan kesamaan pandangan dalam internal PC FSP KEP Sidoarjo terlebih dahulu. Selanjutnya para pengurus akan bekerja sama dengan serikat pekerja buruh lainnya untuk membuat tekanan ke pemerintah dalam menetapkan UMK bertambah besar. Penelitian ini menemukan terjadi hambatan eksternal dan internal dalam mobilisasi gerakan buruh. Hambatan dari dalam eksternal buruh adalah jam kerja dan pihak manajemen perusahaan, selain itu pemerintah terkadang bersifat represif. Hambatan dari internal buruh adalah regenerasi yang buruk dikalangan aktivis buruh.

Kata Kunci : *buruh, upah, mobilisasi, kepentingan, serikat buruh, organisasi*

ABSTRACT

Regulations regarding the minimum wage was introduced to limit the acquisition of salaries received by workers in a month. Minimum wage regulations also limit the companies that do not provide workers' wages below the minimum limit. Minimum wage in Indonesia called UMK (Upah Minimum Kerja/Work Minimum Wage) and UMSk (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Wage Sectoral Minimum District). UMK value is based on the calculation of KHL (Kebutuhan Hidup Layak/Life Well Components) through a survey conducted by the district councils. Further results of the survey will be submitted to the provincial councils to be set by the Governor at the end of the year.

However, the value assigned UMK never meet in real life that workers need. Components are included in the KHL inadequate without a decent quality. This makes the UMK are demanding increased regularly every year. Workers' efforts to achieve the results demanded higher MSE in 2012. The mobilization of labor movement occurs on a large scale and give pressure on the government to provide a significant increase in UMK research focuses on the mobilization of the labor movement and obstacles Sidoarjo received in demanding higher UMK in 2013. In this study, the authors use Charles Tilly's theory of mobilization.

The results are focused on the mobilization of the labor movement Sidoarjo make researchers aware of the process undertaken by the labor movement with the labor Sidoarjo detail. Mobilization of labor on a large scale involving three largest labor confederations Indonesia make pressure to the government to determine UMK grow. The study also found that there is resistance in the external and internal mobilization of the labor movement. The resistance of the external labor is hours worked and the management company, but it sometimes repressive government. Of internal trade barriers are poor regeneration among labor activists.

Keywords : *labor, wage, mobilization, interests, labor union, organization*